



Tabel 5.67 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan Per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(540.930.297.349,74)	(138.992.635.558,77)	(87.000.000,00)	(679.835.932.908,51)
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	(180.847.269.072,42)	(21.780.365.435,31)	-	(202.627.634.507,73)
3	Dinas Kesehatan	(101.235.158.050,27)	(10.939.535.253,56)	-	(112.174.693.303,83)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(2.232.905.023.236,81)	(317.231.014.707,84)	-	(2.550.136.037.944,65)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.130.073.475,41)	(335.400.726,19)	-	(2.465.474.201,60)
6	Badan Penanggulangan Bencana	(18.643.915.390,08)	(867.319.338,02)	(52.284.375,00)	(19.458.950.353,10)
7	Dinas Sosial	(29.884.414.971,96)	(1.111.459.581,00)	-	(30.995.874.552,96)
8	Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	(1.150.769.977,57)	(315.290.005,71)	(46.406.304,00)	(1.419.653.679,28)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(54.609.796.663,98)	(4.518.533.843,96)	(422.000.000,00)	(58.706.330.507,94)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	(3.412.974.869,83)	(198.249.202,69)	-	(3.611.224.072,52)
11	Dinas Perhubungan	(11.370.567.100,94)	(48.209.837.632,86)	(3.563.242.386,50)	(56.017.162.347,30)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(7.982.818.622,24)	(482.937.703,00)	-	(8.465.756.325,24)
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(10.348.365.184,17)	(619.934.258,98)	(437.000.000,00)	(10.531.299.443,15)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(5.912.407.093,20)	(689.716.951,24)	(2.857.142,86)	(6.599.266.901,58)
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(4.473.190.353,19)	(1.131.526.934,23)	-	(5.604.717.287,42)
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(8.383.962.645,92)	(607.586.016,76)	-	(8.991.548.662,68)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	(30.355.466.903,85)	(4.361.240.226,72)	(4.336.550.500,00)	(30.380.156.630,57)
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(7.240.734.925,52)	(2.132.664.283,74)	-	(9.373.399.209,26)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(26.059.521.028,28)	(14.006.623.365,82)	(108.778.030,33)	(39.957.366.363,77)
20	Dinas Peternakan	(18.564.221.065,88)	(2.327.342.859,06)	(4.079.760,00)	(20.887.484.164,94)
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(15.995.163.719,54)	(1.662.621.351,64)	(6.256.273,19)	(17.651.528.797,99)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(8.559.129.170,85)	(597.243.043,94)	(1.014.867.994,00)	(8.141.504.220,79)
23	Sekretariat Daerah	(73.838.569.387,90)	(12.753.471.722,52)	(742.291.304,00)	(85.849.749.806,42)
24	Sekretariat DPRD	(29.457.806.076,10)	(2.239.746.313,29)	(1.534.678.333,33)	(30.162.874.056,06)
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.044.164.848,38)	(601.092.512,80)	-	(4.645.257.361,18)
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	(41.921.592.690,97)	(7.437.271.365,10)	(1.889.154.134,13)	(47.469.709.921,94)
27	Badan Keuangan Daerah	(5.093.388.929,88)	(936.355.088,06)	-	(6.029.744.017,94)
28	Badan Kepegawaian Daerah	(3.357.985.443,80)	(332.193.842,80)	-	(3.690.179.286,60)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(11.562.103.997,50)	(1.403.239.087,48)	-	(12.965.343.084,98)
30	Badan Pengelola Perbatasan	(1.365.165.462,50)	(171.064.557,29)	-	(1.536.230.019,79)
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	(7.369.747.089,45)	(904.906.491,09)	(50.864.580,00)	(8.223.789.000,54)
32	Inspektorat Daerah	(1.881.999.490,64)	(931.160.157,50)	-	(2.813.159.648,14)
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.043.663.018,30)	(199.741.922,50)	-	(2.243.404.940,80)
	Jumlah	(3.502.931.427.307,07)	(601.029.321.341,47)	(14.298.311.117,34)	(4.086.110.131.701,20)

Rincian Lengkap Aset Tetap dilihat pada Lampiran N.13.



d. Dana Cadangan

Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp101.018.749.999,69 merupakan dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Dana Cadangan senilai Rp101.018.749.999,69 terdiri dari Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp100.000.000,00 ditambah Jasa Giro senilai Rp1.018.749.999,65.

Rincian Lengkap Aset Tetap dilihat pada **Lampiran N.14**

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp373.972.116.462,34 adalah aset selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya terdiri dari:

1) Tagihan Jangka Panjang	<u>31 Desember 2022</u> Rp00,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp27.722.867.144,72
---------------------------	------------------------------------	--

Pemerintah Provinsi NTT tidak memiliki saldo Tagihan Jangka Panjang. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi NTT belum memiliki ketetapan terhadap pengakuan kerugian Daerah sampai kondisi per 31 Desember 2022 sehingga tidak ada hak tagih atas kerugian Daerah tersebut. Total Kerugian Daerah Temuan Pemeriksaan sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri dari:

Tabel 5.68 Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Temuan Pemeriksaan

Uraian	Nilai (Rp)
BPK RI Perwakilan Prov. NTT	12.215.898.558,60
Inspektorat Prov. NTT	5.234.139.545,67
Inspektorat Jenderal Kemendagri	1.595.590.000,00
BPKP	9.773.326.485,67
Jumlah	28.818.954.589,94

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.15**

2) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	<u>31 Desember 2022</u> Rp35.243.950.000,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp35.243.950.000,00
----------------------------------	--	--

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga senilai Rp35.243.950.000,00 merupakan Saldo Aset Tetap Tanah yang dialihkan menjadi Aset Lainnya (Kemitraan dengan Pihak Ketiga) akibat adanya Kerjasama Pemanfaatan Aset milik Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp7.092.600.000,00, jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT Flobamor sesuai kontrak Nomor: BU.030/80/BPAD/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan pola KSP (Kerjasama Pengelolaan), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 18.214 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: SU No.15/1983,HPL1/1984 dengan Nilai Tanah senilai Rp3.642.800.000,00.



- b) PT Sarana Investama Manggabar sesuai kontrak Nomor: HK.530 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014 dengan pola Bangun Guna Serah (BGS), masa kontrak 25 tahun, luas Tanah $\pm 31.670 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: HPL Nomor 2/2016 dengan Nilai Tanah senilai Rp1.266.800.000,00. Namun, atas kerja sama dengan PT Sarana Investama Manggabar sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PT Sarana Investama Manggabar telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 30 tahun, dan terkait kerja sama ini masih dalam proses untuk diselesaikan melalui peradilan. Kerja sama ini kemudian digantikan dengan mitra baru yaitu PT Flobamor sesuai kontrak Nomor: BU.030/156/BPAD/2020 dan 004/FLB/PKS dengan pola KSP (Kerjasama Pengelolaan), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 31.670 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: HPL Nomor 2/2016 dengan Nilai Tanah senilai Rp1.266.800.000,00.
- c) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten TTS Nomor: PEM.415.4.43/II/72/XII/2021 tentang Pengelolaan Pariwisata Estate di Fatumnasi Kabupaten TTS senilai Rp2.183.000.000,00.

Aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga akibat adanya sewa aset tanah milik Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp28.151.350.000,00 dengan pola BGS, jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT Nusa Bahana Niaga sesuai kontrak Nomor: HK 34 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 25 tahun, luas Tanah $\pm 60.060 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: HP.14/2000 dengan Nilai Tanah senilai Rp26.424.000.000,00;
- b) PT Suba Suka GO sesuai kontrak Nomor: HK 18 Tahun 2016 dan Nomor 36/556/PBG/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 1.710 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: 8/1999 dengan Nilai Tanah senilai Rp256.500.000,00;
- c) PT Suba Suka GO sesuai kontrak Nomor: HK 18 Tahun 2016 dan Nomor 36/556/PBG/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 6.595 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: 8/1999 dengan Nilai Tanah senilai Rp989.250.000,00; dan
- d) PT Inspirasi Investama Raya sesuai kontrak Nomor: HK.01 Tahun 2016 dan Nomor 20/IIR/PKS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 12.040 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: HP 11/2000 dengan Nilai Tanah senilai Rp481.600.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.16, N.16.1 dan N.16.2**

3) Aset Tak Berwujud	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp15.174.682.173,00	Rp14.851.932.133,00



Saldo senilai Rp15.174.682.173,00 terdiri dari Saldo Awal Aset Tak Berwujud senilai Rp14.851.932.133,00 ditambah Aset Tak Berwujud Tahun 2022 senilai Rp322.750.040,00 dengan rincian penambahan pada SKPD:

Tabel 5.69 Aset Tak Berwujud SKPD

No	Nama SKPD	Saldo ATB	Amortisasi	Nilai Buku
1	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	6.795.017.500,00	(1.762.363.500,00)	5.032.654.000,00
2	Dinas Kesehatan	432.910.000,00	(49.098.000,00)	383.812.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	867.659.995,00	(865.155.199,00)	2.504.796,00
4	Badan Penanggulangan Bencana	1.445.568.634,00	(1.413.811.234,00)	31.757.400,00
5	Dinas Perhubungan	47.795.000,00	(12.745.333,32)	35.049.666,68
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	277.259.790,00	(61.459.500,00)	215.800.290,00
7	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.200.800.000,00	(467.960.000,00)	1.732.840.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	270.113.000,00	(215.210.000,00)	54.903.000,00
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	330.527.500,00	(120.530.000,00)	209.997.500,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	59.950.000,00	-	59.950.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	92.425.750,00	(42.697.750,00)	49.728.000,00
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	111.393.100,00	(61.488.300,00)	49.904.800,00
13	Sekretariat Daerah	480.662.000,00	(320.197.200,00)	160.464.800,00
14	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.600.000,00	(5.600.000,00)	-
15	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	866.855.000,00	(599.205.000,00)	267.650.000,00
16	Badan Keuangan Daerah	84.250.000,00	(74.250.000,00)	10.000.000,00
17	Badan Kepegawaian Daerah	728.894.904,00	(570.246.903,99)	158.648.000,01
18	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-
19	Inspektorat Daerah	25.000.000,00	(6.250.000,00)	18.750.000,00
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.000.000,00	(18.800.000,00)	28.200.000,00
Jumlah		15.174.682.173,00	(6.672.067.920,31)	8.502.614.252,69

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.17**

4) Aset Lain-Lain 31 Desember 2022
Rp330.225.552.209,65 31 Desember 2021
Rp325.331.513.354,31

Saldo senilai Rp330.225.552.209,65 merupakan Aset Lain-Lain. Rincian Aset lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran N.18**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Aset Lain-lain Lainnya senilai Rp251.356.100.000,00 merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTT yang dikelola pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp1.187.600.000,00 dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp250.168.500.000,00. Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang semula saldo awal senilai Rp5.868.405.000,00 namun tahun 2022 tanah atas aset tersebut telah dibeli senilai Rp500.001.000,00 pada Desa Uhtuhtuan, Kecamatan Semau Selatan - Kabupaten Kupang dan Desa Wolwal - Kabupaten Alor maka aset berupa Gedung/bangunan, peralatan dan mesin dan Jalan Jaringan dan Irigasi yang dibangun di atas tanah tersebut senilai Rp4.680.805.000,00 telah dialihkan ke jenis Aset berkenaan. Sedangkan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah berupa aset dalam bentuk tanah yang dimanfaatkan sebagai penyertaan modal pada PT Semen



Kupang tetapi belum diterbitkan Peraturan Daerah Penyertaan modalnya senilai Rp250.168.500.000,00, dan tanah yang telah kalah sengketa tetapi masih dalam proses pengumpulan bukti baru (Novum) untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK). Penjelasan lebih lanjut atas asset lain-lain lainnya sebagai berikut:

- b) Aset Lain-lain Lainnya berupa tanah Pemerintah Provinsi NTT pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang dikuasai oleh PT New Badjo Beach yang berlokasi di Pantai Pede Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, seluas 29.690 m² dengan total nilai senilai Rp1.187.600.000.

Berdasarkan temuan BPK bahwa aset tersebut telah memiliki keputusan hukum untuk dikeluarkan dari inventaris Pemerintah Provinsi NTT sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3068K/Pdt/2014. Namun, Pemerintah Provinsi NTT belum mengeluarkan karena akan melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan MA tersebut, serta memiliki keyakinan akan mendapatkan bukti baru (Novum) untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan 31 Desember 2022 proses tersebut sedang dilaksanakan, sehingga asset tetap tanah seluas 29.690 m² dengan total nilai senilai Rp1.187.600.000 dikeluarkan dari KIB A dan direklas ke asset lainnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Peninjauan Kembali (PK).

- c) Aset Lain-lain Lainnya berupa tanah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang dikerjasamakan dengan PT Semen Kupang melalui Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT, namun sampai dengan tanggal pelaporan dokumen berupa Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan Investasi Jangka Panjang Permanen oleh Pemerintah Provinsi belum diterbitkan. Sesuai LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor: 73.a/LHP/XIX.KUP/06/2020 tanggal 17 Juni 2020, BPK mengungkapkan adanya pengakuan penyertaan modal berupa tanah Pemprov NTT pada PT Semen Kupang belum sesuai ketentuan.

Kondisinya adalah terdapat tanah yang tercatat pada kartu inventaris barang (KIB) A Badan Pendapatan dan Aset Daerah seluas 4.119.330 m² atau 411,93 ha yang terletak di Alak dan Manulai, yang diperuntukan untuk pembangunan pabrik PT Semen Kupang. Berdasarkan risalah rapat Umum Pemegang saham (RUPS) PT Semen Kupang tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2014 Nomor: 058/200.002/05.2015 tanggal 13 Mei 2015 diketahui bahwa, RUPS menyetujui pengalihan kepemilikan saham perseroan sebanyak 1.500. lembar atau 1,12% saham senilai Rp1.500.000.000,00 dari yang sebelumnya atas nama PT FL menjadi atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Risalah RUPS tersebut dituangkan dalam akta notaris yaitu akta pernyataan keputusan RUPS Nomor:111 tanggal 23 Juni 2016, yang



memuat bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah mengambil alih saham PT FL atas PT Semen Kupang.

Hasil analisis atas dokumen tanah yang terkait jelas dengan pemakaian lahan Pemrov NTT oleh PT Semen Kupang seluas $\pm 1.029.500 \text{ m}^2$. Pada pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi NTT masih menemukan bahwa dokumen Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan investasi jangka Panjang belum diterbitkan. Oleh karena itu catatan atas tanah milik Pemprov NTT seluas $\pm 1.029.500 \text{ m}^2$ yang belum di catat pada KIB A dikategorikan sebagai asset Lain-lain - lainnya senilai Rp250.168.500.000,00 ($1.029.500 \text{ m}^2 \times \text{Rp}243.000,00$), dasar perhitungannya menggunakan NJOP tahun 2020.

- d) Aset Lain-lain Lainnya berupa pendapatan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp7.137.185.651,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-5/PK/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Penyampaian Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun 2022 serta Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-46/PK/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Rincian Penyaluran DBH secara Nontunai melalui TDF Tahun 2022.
- e) Aset Lain-Lain yang berasal dari Pengalihan Aset Tetap akibat Rusak Berat yang ada di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp131.369.197.977,62 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat Senilai (Rp89.713.786.336,97).

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.18.1**

- f) Aset Lain yang dialihkan dari Aset Lancar senilai Rp244.972.368,00 adalah Kas di Bendahara Pengeluaran yang terbawa dari Tahun 2013 pada 2 SKPD yakni Dinas Pendidikan senilai Rp64.408.243,00 dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp55.144.125,00 serta Kas pada Bendahara BOS yakni pada SMA Negeri 1 Malaka Timur senilai Rp125.420.000,00 yang terbawa dari Tahun 2017.

Kas yang dialihkan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sampai dengan 31 Desember 2022 masih sementara proses pembayaran oleh ASN bersangkutan selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas sementara Kas senilai Rp64.408.243,00 merupakan sisa UUDP tahun 2012 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp93.658.243,00 yang telah disetor ke Kas Daerah tahun 2018 senilai Rp29.250.000,00 oleh ASN selaku Mantan Bendahara. Kas UUDP Tahun 2012 telah disetor Kas pada Bendahara BOS SMAN 1 Malaka Timur merupakan kas BOS yang hilang di sekolah dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih berproses di Kepolisian.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.18.2**



- g) Aset lainnya yang tidak digunakan Pemerintah senilai Rp600.776.000,00 yaitu Gedung Tambak Garam di Kabupaten Kupang.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.18.3**

- h) Aset untuk dihapus senilai Rp3.748.172.950,00 merupakan aset yang akan dihapus karena telah diberikan kepada yang menerima yakni Gedung Direksi Kit pada Dinas Perhubungan dan Pendamping *Water Resources and Irrigation Sector Management Program* (WISIMP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Akumulasi Penyusutan senilai (Rp21.171.150,00).

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.18.4**

- i) Aset yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai Rp25.504.104.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Aset Peralatan dan Mesin (kendaraan) pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT senilai Rp4.532.100.000,00;
- (2) Aset Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp6.143.031.000,00;
- (3) Aset Tetap Tanah pada Biro Umum senilai Rp575.000.000,00;
- (4) Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta persediaan pada Dinas ESDM senilai Rp14.253.973.750,00, yang terdiri atas:
 - Persediaan PLTS tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 senilai Rp12.200.232.250,00 yang belum teridentifikasi baik rincian maupun dokumen berita acara serah terima barang kepada masyarakat. Penyelesaian persediaan tersebut akan dilaksanakan tahun 2023 setelah dilakukan identifikasi beserta berita acara penyerahan/penghapusan persediaan; dan
 - Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.053.741.500,00 yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Rincian Aset yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Lampiran **N.18.5**

5)	Akumulasi Amortisasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Aset Tak Berwujud	(Rp6.672.067.920,31)	(Rp5.476.969.908,72)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud mengalami kenaikan senilai (Rp1.195.098.011,59) dari saldo awal senilai (Rp5.476.969.908,72) menjadi (Rp6.672.067.920,31) yang merupakan koreksi Amortisasi pada SKPD senilai (Rp37.000.000,00) dan penambahan beban Amortisasi tahun berjalan senilai (Rp1.158.098.011,59).



2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Pemerintah Provinsi NTT memiliki kewajiban jangka pendek berupa Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja Upah Pungut (Insentif), Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD, Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Utang Bagi Hasil Pajak serta Utang kepada Lembaga Keuangan bukan Bank (PT. SMI-PEN).

Total nilai Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp1.267.002.282.371,77 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp286.124.959.115,77	Rp390.635.768.027,47

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 senilai Rp286.124.959.115,77 dan Tahun 2021 senilai Rp390.635.768.027,47 mengalami penurunan senilai (Rp104.510.808.911,70) atau (26,75%) dari tahun 2021.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

1) Utang Bunga Kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp61.069.423.338,00	Rp0,00

Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan bukan Bank atas Kewajiban bunga Pinjaman yang bersumber dari PT. SMI-PEN untuk pembayaran bunga selama tahun 2023 senilai Rp61.069.423.338,00 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 45/KM.7/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyeluran Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.19

2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp00,00	Rp210.015.569.086,21

Saldo Bagian Lancar Utang jangka Panjang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp0,00. Hal ini karena Pemerintah Provinsi NTT telah melunasi semua kewajiban baik kepada Bank NTT maupun kepada PT. SMI-Reguler. Saldo utang Pinjaman Pihak Ketiga senilai Rp210.015.569.086,21 tahun 2022 merupakan telah dibayarkan kepada PT. Bank NTT senilai Rp71.958.361.000,21 sesuai Perjanjian Pinjaman Nomor: 376/DIR-DPKrKM/III/2020 Tanggal 19



Maret 2020 perihal Persetujuan Kredit dan kepada PT. SMI-Reguler yang senilai Rp138.057.208.086,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20**

3) Pendapatan diterima dimuka	<u>31 Desember 2022</u> Rp1.281.125.050,05	<u>31 Desember 2021</u> Rp2.712.571.253,79
-------------------------------	---	---

Jumlah senilai Rp1.281.125.050,05 merupakan Pendapatan diterima di muka atas Pembayaran Sewa Ruko dan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		Rp	316.291.666,67
1	Sewa Ruko	Rp	239.833.333,34
2	Gedung Eks Lokabinkra	Rp	76.458.333,33
Piutang Lain-lain (Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah)		Rp	964.833.383,38
1	Sewa Tanah	Rp	525.000.000,00
2	Kuliner Oepoi	Rp	182.050.000,03
3	Sewa Tanah Eks Sekolah Cina	Rp	23.595.833,34
4	Sewa Bangunan Kantin Kantor Gubernur NTT Pertama	Rp	60.166.666,67
5	Sewa tanah di Kompleks UPT Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang	Rp	5.833.333,34
6	Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah		168.187.550,00
Jumlah		Rp	1.281.125.050,05

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.21**

4) Utang Belanja	<u>31 Desember 2022</u> Rp23.531.085.676,72	<u>31 Desember 2021</u> Rp34.053.595.722,47
------------------	--	--

Utang Belanja Tahun 2022 senilai Rp23.531.085.676,72 dan Tahun 2021 senilai Rp34.053.595.722,47. Jumlah tersebut merupakan kewajiban yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, dan Utang Belanja Modal. Rincian Utang Belanja pada **Lampiran N.22**:

- a. Utang Belanja Pegawai senilai Rp3.795.334.702,00 merupakan utang biaya pemungutan pajak baik itu PKB, BBNKB dan PAP yang dilakukan oleh PNS pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.23, N 23.1, dan N.23.2.**

- b. Utang Belanja Barang dan Jasa Senilai Rp19.264.784.625,72 merupakan utang Insentif Nakes dan Non Nakes, Sewa Rumah dinas untuk Dokter spesialis, utang bahan dan alat laboratorium, pemeliharaan alat kesehatan dan jasa pembakaran limbah senilai Rp5.168.089.268,00 dan utang belanja barang dan jasa pada BLUD RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang senilai Rp13.972.335.439,72 dan utang berupa utang pajak air permukaan senilai Rp2.092.146,00 pada BLUD SPAM serta utang belanja barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.24, N2.4.1, dan N.24.2.**



- c. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp470.966.349,00 merupakan utang perlengkapan serta Peralatan dan Mesin pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.25.**

5) Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp200.243.325.051,00	Rp143.854.031.965,00

Utang jangka pendek lainnya senilai Rp200.243.325.051,00 merupakan utang bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang belum dibayarkan per tanggal 31 Desember 2022 atas penerimaan Pajak tahun 2022 berupa Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp50.691.620.251,00, Pajak/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp46.287.223.429,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp103.077.385.637,00 dan Pajak Air Bawah tanah senilai Rp187.095.734,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.26**

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp980.877.323.256,00	Rp250.778.440.000,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 senilai Rp980.877.323.256,00 dan Tahun 2021 senilai Rp250.778.440.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp730.098.883.256,00 atau (291,13%) dari tahun 2021.

Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp980.877.323.256,00	Rp250.778.440.000,00

Jumlah senilai Rp980.877.323.256,00 merupakan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN Jangka Menengah (PT SMI-PEN) yang dibayar lebih dari 1 (satu) tahun sesuai Perjanjian Pinjaman Nomor: PERJ-12-7/SMI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 yang mulai dibayarkan pada tahun 2024.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.27**

3. EKUITAS

Ekuitas	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp10.396.432.365.578,93	Rp10.233.719.426.349,30

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 senilai Rp10.396.432.365.578,93 mengalami kenaikan senilai Rp162.712.939.229,63 atau



1,59% jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2021 senilai Rp10.233.719.426.349,30.

D. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

1. Pendapatan

Pendapatan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp4.595.645.836.542,61	Rp5.642.524.677.758,20

Pendapatan merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang terealisasi tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.71 Pendapatan

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	1.375.302.062.824,06	1.343.668.711.158,00
2	Pendapatan Transfer – LO	3.060.973.941.512,00	4.000.655.446.445,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	159.369.832.206,55	298.200.520.155,20
Jumlah		4.595.645.836.542,61	5.642.524.677.758,20

Masing-masing Akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp1.375.302.062.824,06	Rp1.343.668.711.158,00

Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 senilai Rp1.375.302.062.824,06 dan Tahun 2021 senilai Rp1.343.668.711.158,00. Akun PAD - LO ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	1.100.178.336.492,33	957.891.853.445,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	62.012.512.860,39	69.563.749.732,45
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	68.092.348.724,36	70.180.239.699,67
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	145.018.864.746,98	246.032.868.280,88
Jumlah		1.375.302.062.824,06	1.343.668.711.158,00

1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh 2 (dua) SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur



yakni: Badan Pendapatan dan Aset Daerah dan Badan Keuangan Daerah. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual di mana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah seluruh pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembayaran atas Piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada Pendapatan LRA. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp1.100.178.336.492,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	284.826.420.622,00	235.562.731.186,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	168.796.403.412,00	176.218.560.037,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	214.277.331.504,00	168.310.347.444,00
4	Pajak Air Permukaan – LO	379.010.501,33	861.901.204,00
5	Pajak Rokok – LO	431.899.170.453,00	376.938.313.574,00
Jumlah		1.100.178.336.492,33	957.891.853.445,00

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO dipungut dan dikelola oleh 21 (dua puluh satu) SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 terealisasi senilai Rp62.012.512.860,39 dengan rincian Pendapatan Retribusi per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.74 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	789.968.000,00	266.040.000,00
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.689.545.389,00	12.115.499.483,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.327.854.140,00	558.129.500,00
4	Dinas Sosial	67.400.000,00	232.650.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	153.000.000,00	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.297.034.040,00	4.176.198.077,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35.160.000,00	20.660.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.270.105.538,00	988.374.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	62.500.000,00	53.000.000,00
10	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	214.005.200,00	153.050.000,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	516.418.000,00	145.969.000,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.165.750,00	15.240.750,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.535.912.232,05	5.689.805.637,45
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	233.596.000,00	124.194.000,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.192.238.205,00	1.265.572.785,00
16	Dinas Peternakan	7.057.397.000,00	5.663.453.000,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.956.650,00	28.400.000,00
18	Sekretariat Daerah	412.793.403,00	204.270.000,00
19	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	612.437.333,34	541.602.500,00
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.354.895.980,00	37.239.291.000,00
21	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	111.930.000,00	63.900.000,00
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.200.000,00	18.450.000,00
Jumlah		62.012.512.860,39	69.563.749.732,45



3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Realisasi pada tahun 2022 senilai Rp86.092.348.724,36 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
PT ASKrida	256.360.816,00	239.619.288,00
PT Jamkrida	12.761.172.924,37	11.989.045.042,63
PT Flobamor	505.026.181,44	922.726.236,11
PT Bank NTT	54.569.788.802,55	57.028.849.132,93
Jumlah	68.092.348.724,36	70.180.239.699,67

4) Lain-lain PAD yang Sah-LO

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD senilai Rp145.018.864.746,98 untuk periode tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	32.933.558,00	3.393.163.416,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO	14.264.805.638,58	52.951.744.805,89
Penerimaan Jasa Giro – LO	5.940.147.964,17	4.128.171.235,78
Pendapatan Bunga – LO	543.570.683,00	512.633.707,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	2.925.140.462,35	26.078.591.673,43
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	11.699.532.916,71	14.458.488.176,27
Pendapatan Denda Pajak – LO	9.208.955.683,00	7.287.618.483,00
Pendapatan dari Pengembalian –LO	5.428.806.171,78	12.967.248.597,14
Pendapatan BLUD – LO	94.974.971.669,39	124.255.208.186,37
Jumlah	145.018.864.746,98	246.032.868.280,88

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO per SKPD

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	94.371.816.357,60	123.988.212.881,73
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	603.155.311,79	266.995.304,64
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	411.672.763,00	263.544.050,00
4	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	23.095.022.116,58	63.368.982.654,89
5	Badan Keuangan Daerah	27.631.554.658,23	58.145.133.389,62
	Jumlah	146.113.221.207,20	246.032.868.280,88



b) Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer-LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp3.060.973.941.512,00	Rp4.000.655.446.445,00

Pendapatan Transfer -LO Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 senilai Rp3.060.973.941.512,00 dan Tahun 2021 senilai Rp4.000.655.446.445,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Realisasi pendapatan transfer untuk periode tahun 2022 senilai Rp3.060.973.941.512,00 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.78 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Dana Perimbangan-LO		
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	72.496.050.766,00	77.108.302.308,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.730.933.330.000,00	1.726.712.089.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	1.243.588.319.746,00	2.189.395.443.137,00
Jumlah	3.047.017.700.512,00	3.993.215.834.445,00
Dana Insentif Daerah (DID) – LO		
Dana Insentif Daerah – LO	13.956.241.000,00	7.439.612.000,00
Jumlah	13.956.241.000,00	7.439.612.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	3.060.973.941.512,00	4.000.655.446.445,00

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1) Pendapatan Hibah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO merupakan Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2022 terealisasi senilai Rp159.369.832.206,55. Dari total Pendapatan Hibah-LO yang berasal dari Pemerintah Pusat senilai Rp156.112.478.580,55 yang terdiri dari merupakan Hibah Obat dan Alat Kesehatan dari Pemerintah Pusat senilai Rp123.682.250.446,55, Hibah Buku siap layanan ke perpustakaan RSUD sebanyak 500 judul senilai Rp63.602.950,00 dari Perpustakaan nasional RI, Hibah Alat Pertanian dari Pemerintah Pusat senilai Rp23.467.800.641,00 dan Hibah berupa uang yang masuk ke Kas Daerah senilai Rp8.898.824.543,00. Hibah obat dari pemerintah lain senilai Rp3.257.291.226, serta hibah alat kesehatan dari pihak swasta senilai Rp62.400. Rincian Lain-lain Pendapatan yang sah sebagai berikut:

**Tabel 5.79 Rincian Lain-lain Pendapatan Hibah – LO**

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	156.112.478.580,55	110.786.183.193,20
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO		1.415.046.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	3.257.291.226,00	
Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO	62.400,00	175.190.556.701,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO		10.808.734.261,00
Jumlah	159.369.832.206,55	298.200.520.155,20

2. Beban**a. Beban**

31 Desember 2022 **31 Desember 2021**
Rp 4.352.539.472.155,81 **Rp5.228.521.893.783,47**

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Pada TA 2022, Beban Pemerintah Provinsi NTT adalah senilai Rp4.352.539.472.155,81.

Beban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp4.352.539.472.155,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80 Rincian Beban

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Beban Pegawai	1.503.626.834.847,37	1.635.960.479.600,00
Beban Persediaan	675.115.766.104,52	526.678.361.263,90
Beban Jasa	467.437.788.920,60	488.936.238.173,88
Beban Pemeliharaan	15.199.660.113,00	16.925.016.349,00
Beban Perjalanan Dinas	114.849.881.940,00	101.515.231.988,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.008.731.990,00	44.514.102.446,00
Beban Bunga	61.069.423.338,00	1.952.333.753,00
Beban Hibah	298.014.627.669,00	1.426.297.749.886,00
Beban Bantuan Sosial	45.615.722.518,00	42.456.177.179,00
Beban Penyisihan Piutang	329.015.141,31	978.158.623,24
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	214.516.717.113,00	169.461.568.645,88
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.005.303.598,52	45.206.014.844,15
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	314.436.869.953,90	264.971.474.637,15
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.600.000,00	29.521.200,00
Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	1.158.098.011,59	1.179.645.424,27
Beban Bagi Hasil	583.892.162.887,00	492.573.266.323,00
Beban Bantuan Keuangan	13.268.000.000,00	10.000.000.000,00
Beban Tak Terduga	-	3.400.655.793,00
Jumlah	4.352.539.472.155,81	5.228.521.893.783,47



1) Beban Pegawai

Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai senilai belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya. Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp1.503.626.834.847,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81 Rincian Beban Pegawai

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	939.155.850.320,36	920.673.933.937,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	143.643.134.592,00	282.450.862.474,00
Beban Penerimaan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	268.399.848.020,00	288.357.480.907,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	60.545.266.319,00	53.809.174.624,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	239.872.346,00	242.532.736,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.228.000.000,00	2.742.986.600,00
Belanja Pegawai BOS	82.823.138.585,00	80.556.714.491,00
Belanja Pegawai BLUD	5.591.724.665,01	7.126.793.831,00
Jumlah	1.503.626.834.847,37	1.635.960.479.600,00

2) Beban Persediaan

Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp675.115.766.104,52.

3) Beban Jasa

Beban Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp467.437.788.920,60.

4) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp15.199.660.113,00.

5) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp114.849.881.940,00.

6) Beban Bunga

Beban Bunga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp61.069.423.338,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.952.333.753,00 dan tahun 2020 senilai Rp6.945.596.966,90. Beban bunga Tahun 2022 merupakan beban bunga pinjaman PT SMI-PEN tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 45/KM.7/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran



kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyelesaian Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023. Sementara beban bunga tahun 2022 telah diatribusikan ke Aset Tetap yang diperoleh dari Pinjaman PT SMI-PEN.

7) Beban Hibah

Beban Hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp286.005.895.679,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82 Rincian Beban Hibah

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.136.760.978,00	10.908.368.499,00
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	12.008.731.990,00	44.514.102.446,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.684.750.000,00	28.959.890.000,00
Beban Hibah kepada BUMN	1.950.000.000,00	
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia	102.918.616.860,00	106.817.850.141,00
Beban Hibah Dana BOS	173.638.947.041,00	1.232.420.718.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00
Jumlah	298.014.627.669,00	1.426.297.749.886,00

Beban Hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar pada Perangkat Daerah pengelola sesuai Tugas Pokok, antara lain:

Tabel 5.83 Rincian Beban Hibah per SKPD

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	243.031.676.241,00
2	Dinas Kesehatan	4.216.952.688,00
3	Dinas Sosial	454.061.500,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.082.198.650,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000.000.000,00
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.221.300.000,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.249.924.822,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.350.000.000,00
9	Sekretariat Daerah	9.220.000.000,00
10	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	3.252.960.978,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.926.820.800,00
	Jumlah	286.005.895.679,00

8) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp45.615.722.518,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84 Rincian Beban bantuan Sosial

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.502.480.000,00	1.224.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu dan/atau Keluarga		
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	33.441.553.646,00	6.250.000.000,00



Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.951.320.000,00	2.769.290.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Pemerintah	4.720.368.872,00	32.212.887.179,00
Jumlah	45.615.722.518,00	42.456.177.179,00

9) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp329.015.141,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	19.842.549,00	19.260.724,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	70.200.320,00	104.800.000,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	228.320.769,76	836.102.934,67
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	10.651.502,55	17.994.964,57
Jumlah	329.015.141,31	978.158.623,24

10) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp214.516.717.113,00.

11) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp44.005.303.598,52.

12) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp314.436.869.953,90.

13) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp3.600.000,00.

14) Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud

Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp1.158.098.011,59.